

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk

Sinta Ayu Febriani¹, Syamsul Huda²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, Indonesia

E-mail: sintaayufebriani48@gmail.com¹, syamsul.huda.ep@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 29 Juni 2026

Revised: 22 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Modal; pertumbuhan ekonomi; desentralisasi fiskal; keuangan daerah.

Abstrak: Desentralisasi fiskal menempatkan kapasitas keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk selama periode 2011–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk masih lebih bergantung pada transfer fiskal antarpemerintah dibandingkan kapasitas pendapatan daerah dan efektivitas belanja modal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kemandirian fiskal, peningkatan kualitas alokasi belanja modal, dan pengelolaan transfer yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi umumnya digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja dan dinamika perekonomian suatu wilayah, sedangkan pembangunan ekonomi mencerminkan proses yang lebih luas dan berjangka panjang. Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga mencakup upaya peningkatan pendapatan per kapita melalui penanaman modal, pemanfaatan teknologi yang lebih maju, peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta perbaikan dalam organisasi dan manajemen ekonomi (Marcal et al., 2024).

Secara makro, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara maupun daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan aktivitas produksi, investasi, konsumsi, serta kesempatan kerja.

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, semakin besar pula peluang suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Secara empiris, pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) dari satu periode ke periode berikutnya. PDB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah, sedangkan PNB mencakup produksi yang dihasilkan oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri (Kusumawardhani et al., 2023). Dengan demikian, PDRB menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks pembangunan regional, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, tingkat investasi, pembangunan infrastruktur, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah (Djadjuli, 2018).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengelola dana transfer dari pemerintah pusat, serta mengalokasikan belanja daerah guna mendukung pembangunan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Hastuti, 2018).

Salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional adalah Provinsi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki struktur ekonomi yang relatif beragam dengan dukungan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, transportasi, serta berbagai sektor jasa lainnya. Pulau Jawa masih berperan sebagai pusat pertumbuhan utama perekonomian nasional, dengan Provinsi Jawa Timur menempati posisi strategis sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB nasional (Putri & Rizal, 2022). Posisi ini menjadikan kinerja ekonomi Jawa Timur sebagai indikator penting dalam menilai stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.

Meskipun secara umum Provinsi Jawa Timur menunjukkan kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan capaian ekonomi setiap kabupaten dan kota di dalamnya. Karakteristik ekonomi, potensi sumber daya, kapasitas fiskal, serta kualitas pembangunan yang berbeda menyebabkan setiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang beragam.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Secara geografis, Kabupaten Nganjuk berada pada jalur penghubung antarwilayah di Provinsi Jawa Timur sehingga memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas barang, jasa, maupun aktivitas perekonomian (Amalia, 2025). Selain itu, ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah menjadikan Kabupaten Nganjuk memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi sebagai penopang pertumbuhan daerah. Potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perekonomian daerah apabila didukung oleh pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk mengetahui perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Melalui indikator tersebut, dapat diketahui bagaimana perkembangan aktivitas ekonomi daerah sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas sektor swasta, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber-sumber pendapatan serta mengalokasikan belanja daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi ekonomi yang dimiliki, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun oleh pemerintah daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat (Nasir, 2019).

Secara umum, peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Namun demikian, peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada setiap tahunnya. Sebagai contoh, PAD terus meningkat pada periode 2019–2021, sedangkan pertumbuhan ekonomi justru mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan baru mulai pulih pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2024 PAD meningkat sebesar 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan ekonomi justru menurun dari 5,40 persen pada tahun 2023 menjadi 4,93 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah belum tentu secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila belum diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang efektif serta didukung oleh kondisi ekonomi yang kondusif.

Selain PAD, sumber pendanaan pembangunan daerah juga berasal dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah serta mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Hastuti, 2018). Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan Dana Perimbangan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Dana Perimbangan menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi besar terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih relatif rendah. Sebagai instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah daerah memperoleh tambahan kapasitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara umum, peningkatan Dana Perimbangan menunjukkan adanya dukungan fiskal dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Namun demikian, perubahan Dana Perimbangan belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang searah. Sebagai contoh, Dana Perimbangan meningkat cukup tinggi pada tahun 2017 sebesar 29 persen, tetapi pertumbuhan ekonomi justru sedikit menurun dari 5,29 persen pada tahun 2016 menjadi 5,26 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pada tahun 2023 Dana Perimbangan meningkat sebesar 20 persen dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan menjadi 5,40 persen.

Selain didukung oleh sumber penerimaan daerah, keberhasilan pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh kualitas pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengeluaran yang memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi adalah Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, menarik investasi, serta menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah (Saputra et al., 2021).

Fluktuasi Belanja Modal tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur, gedung, jalan, dan fasilitas publik, mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Namun demikian, perubahan Belanja Modal tidak selalu diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi yang searah. Sebagai contoh, pada tahun 2022 Belanja Modal meningkat sebesar 28 persen dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 4,84 persen. Sebaliknya, pada tahun 2025 Belanja Modal menurun sebesar 25 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi justru meningkat dari 4,93 persen pada tahun 2024 menjadi 5,30 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal belum tentu secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas pemanfaatan anggaran, kualitas pelaksanaan pembangunan, serta faktor-faktor ekonomi lainnya turut menentukan sejauh mana Belanja Modal dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun Belanja Modal belum tentu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Secara teoritis, kapasitas fiskal yang semakin besar seharusnya memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, kondisi empiris di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi masih memperlihatkan dinamika yang beragam. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan dengan besarnya penerimaan daerah itu sendiri.

Fenomena tersebut sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik yang dikemukakan oleh *Solow-Swan*, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah, Belanja Modal pemerintah merupakan bentuk investasi publik yang dapat meningkatkan stok modal fisik melalui pembangunan infrastruktur sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas dan output ekonomi (Sukirno, 2019). Selain itu, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berperan sebagai sumber pembiayaan utama yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan investasi publik secara berkelanjutan.

Meskipun secara teoritis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal

diperkirakan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini sejalan dengan penelitian Siregar (2023) karena meningkatnya kemandirian fiskal mampu memperluas kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan karena kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian mengenai Dana Perimbangan dan Belanja Modal juga menunjukkan inkonsistensi. Sejumlah penelitian seperti penelitian Agustia & Digidowiseiso (2023) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, penelitian lainnya menemukan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan yang sejalan dengan penelitian Ifani (2021) karena alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang membuka peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada tingkat kabupaten dengan karakteristik fiskal dan ekonomi yang berbeda-beda.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penelitian mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana ketiga komponen keuangan daerah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Meskipun penerimaan daerah dan alokasi belanja terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk masih menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum tentu secara langsung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nganjuk”.

LANDASAN TEORI

Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Meningkatnya PAD menunjukkan adanya peningkatan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal, peningkatan kemampuan daerah dalam menghimpun PAD akan memperbesar kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai upaya tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendanaan utama pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana tersebut digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta

penyediaan pelayanan publik. Melalui Dana Perimbangan, pemerintah daerah memperoleh tambahan kapasitas fiskal sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Oates (1999), transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal melalui Dana Perimbangan memungkinkan pemerintah daerah membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif.

Hubungan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Aset yang dibangun melalui Belanja Modal, seperti jalan, jembatan, gedung, jaringan irigasi, serta fasilitas pelayanan publik lainnya, berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas ekonomi, menurunkan biaya distribusi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Berdasarkan Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Romer, investasi pemerintah melalui pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas suatu daerah. Semakin besar alokasi Belanja Modal yang dimanfaatkan secara efektif, semakin besar pula peluang terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi.

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, temuan dari penelitian-penelitian terdahulu, serta landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan beberapa hipotesis yang akan diuji, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk.
2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk.
3. Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Prosedur penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui instrumen tertentu serta melakukan pengolahan data secara statistik guna menguji kebenaran dari hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret waktu (*time series*) selama periode 2011–2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus analisis pada kinerja ekonomi dan keuangan daerah di wilayah tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tahun 2025 hingga 2026, yang mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

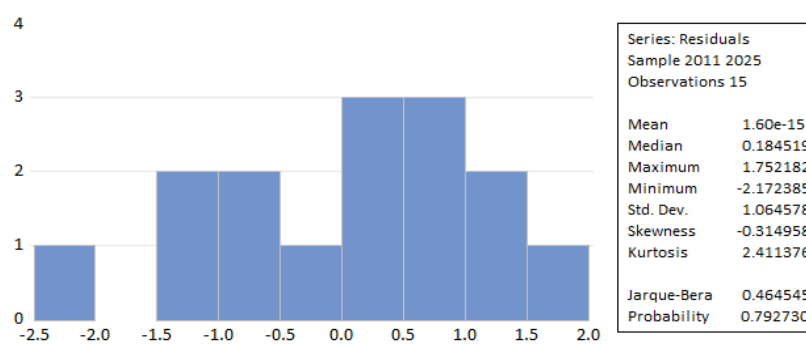
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk selama periode 2011-2025. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan variabel penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan alat bantu statistik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan perangkat lunak EViews 12. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan nilai PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara parsial maupun simultan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk selama periode 2011-2025 (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota berada di Nganjuk. Secara geografis, Kabupaten Nganjuk terletak pada posisi yang strategis karena dilalui oleh jalur nasional yang menghubungkan beberapa kota besar di Jawa Timur maupun provinsi di sekitarnya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.224 km² yang terdiri atas 20 kecamatan, 264 desa, dan 20 kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung di sebelah selatan, Kabupaten Jombang di sebelah timur, serta Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo di sebelah barat. Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk didominasi oleh beberapa lapangan usaha utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Nganjuk menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun sempat mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Uji Normalitas



Sumber: Data diolah

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Kabupaten Nganjuk, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,792730 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,208649	2,169789	–
X1	0,000307	1,931167	1,050821
X2	0,000548	1,516245	1,124973
X3	0,000137	1,396942	1,177973

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Kabupaten Nganjuk, diperoleh nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) pada setiap variabel independen yang berada di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Statistik Pengujian	Nilai	Probabilitas
F-statistic	5,455680	0,0382
Obs*R-squared	13,61371	0,1367
Scaled explained SS	5,166449	0,8196

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan White Heteroskedasticity Test pada Kabupaten Nganjuk, diperoleh nilai Prob. Obs*R-squared sebesar 0,1367 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (LM test)

Statistik Pengujian	Nilai	Probabilitas
F-statistic	2,486218	0,1382
Obs*R-squared	5,338120	0,0693

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan LM Test (*Breusch-Godfrey*), diperoleh nilai probabilitas (*Prob. Chi-Square*) sebesar 0,0693 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga asumsi independensi residual telah terpenuhi.

Model Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3,722238	0,456781	8,148839	0,0000
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,004831	0,017534	0,275507	0,7880

Dana Perimbangan (X2)	0,088882	0,023408	3,797116	0,0030
Belanja Modal (X3)	0,015371	0,011715	1,312133	0,2162

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel di atas, dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (C) sebesar 3,722238 menunjukkan bahwa apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bernilai konstan, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk sebesar 3,722238 persen.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,004831 bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka akan diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004831 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar 0,088882 bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa ketika Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka akan diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,088882 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal sebesar 0,015371 bernilai positif, maka dapat diartikan bahwa ketika Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah, maka akan diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,015371 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

R-squared	Adjusted R-squared
0,669796	0,579741

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada Kabupaten Nganjuk diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,579741. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal mampu menjelaskan variasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk sebesar 57,97 persen, sedangkan sisanya sebesar 42,03 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini jika ditinjau berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh akumulasi modal, tetapi juga oleh tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Meskipun Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, peningkatan tersebut belum tentu langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila belum dialokasikan secara efektif pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan output daerah. Selain itu, Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates(1999) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber pendapatannya sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD, melainkan juga oleh efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2022) yang

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Penelitian Siregar (2023) juga menunjukkan bahwa sebagian besar komponen Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik fiskal masing-masing daerah, perbedaan struktur ekonomi, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, serta perbedaan periode pengamatan dan metode analisis yang digunakan.

Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Nganjuk. Selama periode 2011–2025, Pendapatan Asli Daerah memang menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari Rp94,28 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp637,82 miliar pada tahun 2025. Namun, peningkatan PAD tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada setiap tahunnya. Sebagai contoh, PAD meningkat sebesar 31 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan daerah belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik Solow yang menyatakan bahwa akumulasi modal merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan output dalam suatu perekonomian. Dana Perimbangan sebagai transfer fiskal dari pemerintah pusat menjadi tambahan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Oates (1999), yang menjelaskan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antardaerah serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Apabila Dana Perimbangan dialokasikan secara efektif pada kegiatan yang produktif, maka dana tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra et al. (2017) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dana Perimbangan mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Agustia & Digdowiseiso (2023) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sebagai salah satu komponen Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kondisi tersebut sesuai dengan kondisi riil Kabupaten Nganjuk. Selama periode 2011–2025, Dana Perimbangan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam struktur penerimaan daerah. Meskipun sempat mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2020 sebesar 29 persen akibat penyesuaian kebijakan fiskal selama pandemi COVID-19, Dana Perimbangan kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp1,84 triliun pada tahun 2025. Besarnya dana transfer tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi ini memperkuat hasil penelitian bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini jika ditinjau berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik Solow menjelaskan bahwa akumulasi modal memang berperan dalam meningkatkan output ekonomi, namun pengaruhnya akan semakin berkurang apabila tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kemajuan teknologi. Selain itu, berdasarkan Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Romer, Belanja Modal sebagai bentuk investasi pemerintah seharusnya mampu meningkatkan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Namun demikian, dampak Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu dapat dirasakan dalam jangka pendek karena pembangunan infrastruktur memerlukan waktu sebelum memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunus & Amirullah (2019) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh. Penelitian Ifani (2021) juga memperoleh hasil bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa besarnya alokasi Belanja Modal belum tentu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila pelaksanaannya belum optimal, realisasi anggaran belum efektif, atau manfaat pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kabupaten Nganjuk. Selama periode 2011–2025, Belanja Modal mengalami fluktuasi yang cukup besar. Belanja Modal meningkat dari Rp113,96 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp447,73 miliar pada tahun 2016, kemudian menurun sebesar 29 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2020 Belanja Modal kembali mengalami penurunan tajam sebesar 46 persen akibat adanya refocusing anggaran selama pandemi COVID-19. Setelah itu Belanja Modal kembali meningkat hingga tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal di Kabupaten Nganjuk belum stabil. Selain itu, hasil pembangunan infrastruktur umumnya baru memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi dalam jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga pada periode penelitian ini pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat signifikan.

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik Solow yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal merupakan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah. Selain itu, teori Desentralisasi Fiskal dan *Fiscal Federalism* juga menjelaskan bahwa kombinasi antara kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan sendiri serta dukungan transfer fiskal dari pemerintah pusat akan memperkuat kapasitas keuangan daerah. Apabila seluruh sumber pembiayaan tersebut dikelola secara efektif dan diarahkan pada kegiatan yang produktif, maka secara bersama-sama akan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan

ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih & Noviaty (2019) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ifani (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Investasi, dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

Kondisi tersebut sesuai dengan kondisi riil Kabupaten Nganjuk. Selama periode 2011–2025, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pemanfaatan Dana Perimbangan, serta pengalokasian Belanja Modal untuk mendukung pembangunan daerah. Meskipun perkembangan masing-masing variabel mengalami fluktuasi dan tidak seluruhnya berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, keberadaan ketiga instrumen fiskal tersebut secara bersama-sama mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh saingPAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan penerimaan daerah belum secara langsung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Hasil ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pembiayaan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang diduga dipengaruhi oleh efektivitas pengalokasian anggaran maupun waktu yang dibutuhkan agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 57,97%, sedangkan sisanya sebesar 42,03% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta pengembangan potensi ekonomi lokal sehingga PAD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah daerah diharapkan mengelola Dana Perimbangan secara lebih efektif dengan mengutamakan alokasi anggaran pada program-program yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan

sektor-sektor ekonomi unggulan agar manfaat dana transfer dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Belanja Modal agar lebih tepat sasaran serta berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, menarik investasi, dan mempercepat aktivitas ekonomi daerah.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, tenaga kerja, inflasi, tingkat pengangguran, atau konsumsi masyarakat. Selain itu, penggunaan periode penelitian yang lebih panjang maupun metode analisis yang berbeda diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Agustia, D., & Digdowiseiso, K. (2023). The Effect of Capital Expenditure, Investment, and General Allocation Funds on the Rate of Economic Growth in Regencies and Cities in Riau Province, 2016--2020. *Jurnal Ekonomi*, 12(2), 798–805.
- Amalia, Y. (2025). Analisis Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan untuk Pembangunan Wilayah: Studi Kasus Kabupaten Nganjuk. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Saintek*, 2(2), 560–571.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67–76. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3942>
- Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i2.1409>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara*, 784–799.
- Hidayat, K., Gunawan, E., & Gunawan, Y. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Bisnis di Masa Pandemi Pada Pelaku Bisnis Generasi Milenial di Wilayah Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 45–55. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4006>
- Ifani, R. F. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2015--2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7782>
- Kusumawardhani, Z. N., Muhammadin, A., Koesriwulandari, Faried, A. I., Hastin, M., Gaffar, M. I., Awaliah, N., Eliza, Y., Pravitasari, C. F., R., S. A., Hippy, M. Z., Wisnujati, N. S., Fajrillah, & P., R. (2023). *Teori Dasar Ekonomi* (M. J. F. Sirait (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan Ekonomi sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014--2018. *Ekonomis:*

- Journal of Economics and Business*, 3(2), 91–95.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.67>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Putri, E. A., & Rizal, F. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur pada Masa COVID-19. *Journal of Economics and Social Sciences*, 1(2), 100–110.
- Saputra, M. R., Haliah, H., & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134.
<https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Siregar, S. A. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003--2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 194–204.
<https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.1.18>
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 186–193.